



KUOTA, JALUR MASUK, DAN TANTANGAN VERIFIKASI

KUOTA SPMB:

Antisipasi Kursi Kosong SPMB Kota Jogja:

- Bila kuota jalur tertentu tidak terpenuhi, maka dialihkan ke Jalur Domisili Daerah
- Contoh: Jalur mutasi orang tua wajib minimal 40 persen, sisanya masuk domisili
- Seleksi hanya 1 kali. Tidak ada gelombang kedua.
- Jalur domisili jadi penampung kuota sisa

JALUR PENDAFTARAN:

Tujuh Jalur Pendaftaran SPMB Kota Jogja:

Prestasi Khusus, Prestasi Akademik, Domisili Radius, Disabilitas, Mutasi Orang Tua, Domisili Daerah Khusus (Umbulharjo), Afirmasi KSJPS dan Prestasi Umum (tahap berikutnya).

MASALAH: DAFTAR ULANG

- Tahun lalu: 3-4 siswa tidak daftar ulang
- Penyebab: Salah pilih sekolah, kurang sosialisasi
- Solusi: Tahun ini ada fitur ubah pilihan sekolah
- Harapan: Tidak ada bangku kosong

SPMB KULON PROGO:

Masalah di SMPN 1 Wates:

- Pendaftar membludak (hingga 300 siswa)
- Antrean panjang, hingga keluar gerbang
- Verifikasi dokumen manual makan waktu lama
 - Banyak kesalahan data (nilai rapor, alamat)
 - Cek titik domisili, harus cocok KK dan koordinat rumah

Secara garis besar jalur domisili daerah berfungsi sebagai penampung kuota sisa."

MANARIMA



GRAFIK: RYDEN K. YUDHANALIRADAR JOGJA

Kuota Sisa Dialihkan ke Jalur Domisili Daerah

Antisipasi Kursi Kosong di SPMB Kota Jogja

JOGJA - Proses pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP di Kota Jogja 2025 sedang berlangsung. Di tengah jalannya seleksi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja mengantisipasi potensi munculnya kursi kosong akibat siswa tidak melakukan daftar ulang karena berbagai alasan ■ *Baca **Kuota...** Hal 7*

Kuota Sisa Dialihkan ke Jalur Domisili Daerah

Sambungan dari hal 1

Kabid Pendidik Tenaga Kependidikan, Data dan Sistem Informasi Disdikpora Kota Jogja Manarima menjelaskan, pihaknya telah menyusun skema alokasi ulang kuota secara sistematis untuk mencegah bangkukosongtakterisi. Disebutkan, dalam regulasi SPMB 2025 ada tujuh jalur masuk yang digunakan.

Jalur-jalur itu, antara lain, jalur prestasi khusus, prestasi akademik, domisili radius, disabilitas, mutasi orang tua, domisili daerah khusus Umbulharjo, serta afirmasi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSIPS) dan prestasi umum yang akan dibuka di tahap berikutnya. "Penyelenggaraan seleksi dilakukan bertahap. Bila kuota dari satu jalur tidak terpenuhi, maka sisa kursinya otomatis dialihkan ke jalur domisili daerah," katanya kepada *Radar Jogja*, kemarin (24/6).

Ia mencontohkan, kuota jalur mutasi orang tua tidak terpenuhi maka akan dialihkan ke domisili daerah karena jalur ini minimal harus terpenuhi 40 persen. "Secara garis besar jalur domisili daerah berfungsi sebagai penampung kuota sisa," lanjutnya.

Ia juga menegaskan secara regulasi seleksi hanya satu kali. Tidak boleh menyelenggarakan seleksi

gelombang kedua. "Karena jika ada seleksi lagi, itu akan merugikan sekolah swasta. Kalau ada kursi kosong karena siswa tidak daftar ulang, maka akan dibiarkan kosong," katanya.

Manarima menjelaskan, tahun ini Disdikpora Kota Jogja membuka opsi perubahan pilihan sekolah untuk meminimalisasi siswa salah pilih sekolah. "Kami harap ini bisa mengurangi kasus siswa tidak melakukan daftar ulang. Kalau pun ada yang tidak daftar ulang, kami yakin jumlahnya tidak signifikan," harapnya.

Berkaca pada tahun sebelumnya, Manarima mengakui ada beberapa siswa yang tidak melakukan daftar ulang, sehingga kuota kursi di beberapa sekolah tidak terpenuhi 100 persen. "Tahun lalu ada 3-4 siswa yang tidak daftar ulang. Semoga tahun ini tidak ada. Kalau pun ada semoga hanya sedikit," ujarnya.

Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Indah Lestari warga Baciro berharap sistem seleksi bisa mempertimbangkan lebih banyak fleksibilitas, terutama bagi siswa yang ragu dengan pilihannya. Ia mengungkapkan anaknya sempat kebingungan menentukan pilihan sekolah.

Untungnya tahun ini ada mekanisme ubah pilihan sekolah sehingga

lebih fleksibel. "Harapan saya, semua siswa bisa merasa nyaman dengan sekolah pilihannya," ujarnya.

Indah juga menambahkan komunikasi dan sosialisasi dari pihak sekolah dan Disdikpora sangat membantu orang tua memahami proses pendaftaran. "Saya beberapa kali datang langsung ke dinas minta penjelasan secara langsung. Biar lebih lega dan jelas," tandasnya.

Verifikasi Dokumen Bikin Guru Lembur

SPMB jenjang SMP di Kulon Progo, beberapa sekolah mengalami penumpukan pendaftar. Hal ini diakibatkan faktor verifikasi dokumen yang memakan banyak waktu dan pendaftaran yang memiliki rentang waktu singkat.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kulon Progo Nur Wahyudi membenarkan beberapa sekolah yang mengalami penumpukan pendaftar. Salah satu penyebabnya, proses verifikasi dokumen yang cukup lama. "Temuan di SMPN 1 Wates, jalur prestasi perlu kerja keras, karena prosesnya lama dan teliti," ucap Nur saat ditemui *Radar Jogja*, kemarin (24/6).

Nur mengungkapkan, verifikasi dokumen terbagi menjadi dua tahap. Di antaranya verifikasi dokumen *online* dan langsung. Pe-

numpukan pendaftar di beberapa sekolah terjadi akibat verifikasi dokumen langsung yang memakan banyak waktu. Bahkan beberapa sekolah perlu menambah jam kerja mereka agar verifikasi bisa dilakukan segera.

Temuan itu menjadi bahan evaluasi pihaknya. Lantaran penumpukan pendaftar memang benar-benar terjadi. Khususnya di sekolah-sekolah yang diklaim sebagai sekolah unggulan. Tujuannya agar di SPMB tahun selanjutnya penumpukan tak terulang kembali.

Kepala SMPN 1 Wates Sugeng Widadi mengungkapkan, penumpukan pendaftar bisa terjadi akibat tiga hal. Di antaranya, minat pendaftar yang membeludak, waktu verifikasi dokumen, dan rentang waktu pendaftaran cukup singkat. "Memang peminat siswa untuk sekolah di sini cukup banyak, otomatis antrean juga menumpuk," ucapnya.

Sugeng mengungkapkan, antrean mengular hingga keluar gerbang memang sempat terjadi di hari pertama SPMB. Verifikasi dokumen yang lama dengan pendaftar yang banyak cukup banyak menyita waktu pendaftaran.

Bahkan petugas pendaftaran yang merupakan guru sekolah, terpaksa lembur. Akibat proses verifikasi data dilakukan cukup lama. Sedang-

kan jumlah pendaftar mencapai 300 siswa. "Kemarin verifikasi dokumen hingga pukul 17.00," ungkapnya.

Hal ini juga diperparah dengan rentang waktu SPMB yang cukup singkat. Terdapat tiga jalur yang hanya dilaksanakan di hari pertama hingga kedua. Di antaranya, jalur domisili radius, prestasi, dan mutasi. Dua hari pendaftaran SPMB dirasa kurang, mengingat minat siswa cukup tinggi.

Di tahun 2024, SPMB jalur domisili dan wilayah disediakan waktu hingga tiga hari. Tujuannya untuk mengurangi kepadatan pendaftar. Psikologis orang tua yang melihat waktu SPMB cukup singkat, membuat pendaftaran sudah padat sejak hari pertama. Lantaran, orang tua harus memastikan anaknya terdaftar di beberapa jalur untukantisipasi jika tak diterima di jalur tertentu. "Waktu yang terbatas membuat kami harus mengatasinya dengan cara lembur," ungkapnya.

Selain itu, proses verifikasi dokumen secara langsung juga penuh kendala, semakin menambah lamanya pendaftaran. Penyebabnya berkaitan dengan kesalahan data *input* yang tak sesuai. Kebanyakan orang tua maupun siswa tak melakukan pengecekan terhadap data pendaftaran dengan dokumen pendukung.

Temuan di SMPN 1 Wates, banyak pendaftar jalur prestasi mengalami ketidaksesuaian data nilai rapor dengan data nilai di *website* SPMB. Hal ini baru terlihat saat verifikasi langsung. Akibatnya, orang tua atau siswa perlu mengubah data. Untuk perubahan data juga memerlukan waktu. Lantaran perubahan data yang sudah valid harus dilakukan oleh operator sekolah asal (SD) ataupun melalui Disdikpora.

"Yang lama juga pencocokan titik tempat tinggal dengan alamat yang tertera di *website*," ungkapnya.

Khusus di jalur domisili, petugas juga membutuhkan waktu lama untuk pencocokan. Lantaran titik yang ada di *website* perlu dicocokkan dengan kartu keluarga. Sekaligus petugas perlu meninjau titik apakah benar terdapat rumah di titik yang terekam dalam *website*.

Sebenarnya pendaftaran SPMB disusun tak memakan banyak waktu. Namun, karena banyaknya kesalahan dokumen, SPMB tergolong lama. "Sebenarnya kalau datang untuk verifikasi hanya 10 menit," ungkapnya.

Verifikasi langsung harus memastikan kesesuaian data. Namun banyaknya data pendaftar yang salah, cukup mengulur banyak waktu. Hingga verifikasi data memakan waktu hingga berjam-jam. (*iza/gas/laz/rg*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005